

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membantu pemerintah pusat dan daerah menjalankan pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk dalam kategori e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan bagian dari implementasi e-Government, yang merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pada pemerintahan. Dalam konteks e-Government, SPBE menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPBE juga membantu menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah, mencapai tujuan, dan meningkatkan pelayanan publik bagi stakeholder pemerintah. Selain itu juga dapat membantu untuk menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dan kehadiran SPBE dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat mencakup untuk masyarakat luas.

Dengan adanya e-Government dapat membantu proses penyelenggaraan pemerintahan agar segala proses tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan hal tersebut dapat membantu untuk mewujudkan good governance (Sudirman & Saidin, 2022) dengan kehadiran e-Government maka interaksi pemerintah dengan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dengan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship) dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

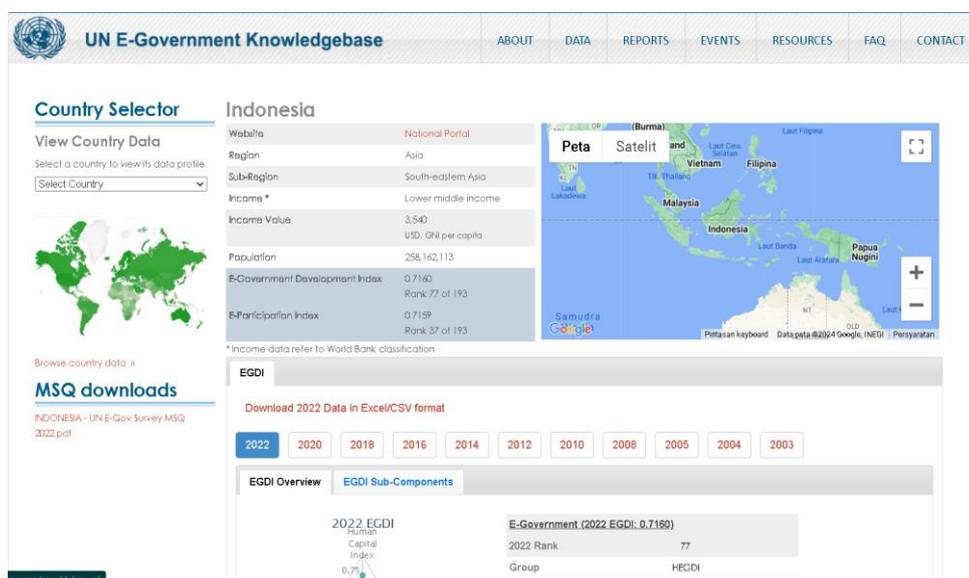
Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa praktisi e-government di berbagai negara menunjukkan bahwa ada tiga (tiga) masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan saat mengembangkan konsep e-government di negara mereka sendiri, yaitu : (Richardus Eko Indrajit, 2008)

1. Tantangan terkait masalah dengan membangun dan menetapkan jalur akses digital dan elektronik yang dapat digunakan oleh publik dan pemerintah secara efektif.
2. Tantangan masalah yang muncul karena pihak-pihak lain di luar pemerintah, termasuk perusahaan swasta dan pihak non komersial lainnya, terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur e-government yang diperlukan
3. Tantangan terkait penyusunan strategi institusi utamanya yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional, Sehingga program manajemen perubahan e-government ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Richard Heeks (2003), penyebab utama kegagalan implementasi e-government di negara berkembang adalah kurangnya pemahaman tentang "keadaan sekarang" (*where we are now*) dan "apa yang akan kita capai dengan proyek e-government" (*where the e-government project wants to get us*). Dengan kata lain, ada perbedaan besar antara realitas saat ini dan rencana e-gov yang dimaksudkan untuk mengubah situasi. Menurut Heeks, perbedaan ini terdiri dari berbagai dimensi yang disebut ITPOSMO. Dimensi ini mencakup informasi, teknologi, proses, tujuan dan prinsip, tenaga kerja dan keterampilan, manajemen sistem dan struktur, dan sumber daya tambahan seperti waktu dan uang.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah merencanakan untuk menggunakan TIK untuk membuat pemerintahan elektronik untuk pemerintahan yang baik yang terintegrasi dari tingkat pemerintahan daerah hingga pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang akan dibangun dapat digunakan secara bersama, sehingga seluruh lembaga, baik di pusat maupun di daerah, dapat bekerja sama. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang "kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov Indonesia", dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengembangan e-Gov. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 juga mencakup panduan yang telah disosialisasikan sebelumnya untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society).

Beberapa negara telah cukup baik menerapkan *e-government*, walaupun beberapa negara lain masih banyak kesulitan dalam menerapkannya. Menurut hasil survei *United Nations E-Government Survey 2022*, secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.7160 di dalam kelompok *High E-Government Development Index (EGDI)* pada *United Nations E-Government Survey 2022* sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat global di peringkat 77 pada tahun 2022. Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan naik 30 peringkat dari urutan 107 di tahun 2018 dari 193 negara. Selain itu, menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk “*E-government Survey 2022*”, Indonesia juga menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik alias *e-government* terbaik di Asia Tenggara pada 2022. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High EGDI, untuk poin 0.50 hingga 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 hingga 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI, seperti gambar yang ada di bawah.



Gambar I. 1 Peringkat E-Government Indonesia di Dunia.

Sumber: *United Nations E-Government Survey*

Faktanya, penerapan *e-government* di Indonesia masih dianggap sebagai proyek yang hanya cukup untuk memiliki website atau aplikasi tetapi tidak

mengoptimalkannya. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Indonesia, Bambang Dwi Anggono, mengatakan “*e-government* nasional menjadi susah terwujud karena ada ribuan pusat data, ada ribuan aplikasi, dan database yang notabenehnya akhirnya aplikasi dan database ini tersebar pada ribuan pusat data atau ruang server. Jadi, ketika mau disatukan menjadi satu pekerjaan yang sangat berat dan mungkin hampir mustahil untuk dilakukan,”. Bambang juga menyatakan bahwa banyak orang masih belum menggunakan layanan yang telah disediakan pemerintah melalui TIK. Selanjutnya, sumber daya manusia (SDM), khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), masih dianggap tidak memadai dalam hal menjalankan e-government. “Di dalam diri kita sendiri, kita juga mengakui bahwa tidak semua ASN atau semua komponen personel yang ada dalam pemerintahan memiliki pemahaman IT dan teknis yang baik. Bahkan pengetahuan mereka tentang keamanan kadang-kadang masih rendah dan tidak merata. Bambang menyatakan bahwa, selain mengancam keterlambatan penyelenggaraan e-government, ada juga ancaman keamanan informasi yang berasal dari dalam (Clarissa Ethania, 2021).

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat melihat kondisi aktual dari kesiapan pemerintah dalam melakukan implementasi e-Government terutama ERP dengan melihat variabel apa saja yang belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pemerintah melalui metode TOE agar penerapan e-government khususnya ERP berhasil diterapkan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas manajemen informasi di seluruh perusahaan termasuk pemerintahan, adalah dengan menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)*. Dengan adanya sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* yang digunakan oleh pemerintahan maka pelaksanaan e-Government akan lebih baik (D. Litan et al., 2011). (Koh et al., 2008) menyatakan bahwa e-Government mengalami proses transformasi dari fungsi informasi, transaksi dan operasional yang terpisah menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut pada satu portal. Kemudian *Enterprise Resource Planning (ERP)* juga mengintegrasikan seluruh sistem e-Government, dimana menurut (Wibisono, 2005) *Enterprise Resource Planning (ERP)* mengintegrasikan sistem yang tadinya saling berdiri

sendiri pada departemen departemen yang ada. Setiap departemen masih memiliki sistem sendiri, tetapi semua sudah terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat memantau suatu permasalahan yang terjadi secara terstruktur. Septiawan et al., (2023) juga menyatakan bahwa penggabungan ERP dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih canggih dan responsif yang dapat menangani tantangan masa depan. Hal-hal tersebut dapat membuktikan bahwa *Enterprise Resource Planning (ERP)* dapat mengatasi permasalahan yang disebutkan oleh Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah bapak Bambang Dwi Anggono.

Dalam implementasi e-government, evaluasi kesiapan teknologi pemerintah atau e-readiness sangatlah vital karena pemerintah memiliki peran kunci dalam keseluruhan kesiapan teknologi suatu negara dan berperan sebagai penentu atau penyelidik kebutuhan teknologi negara tersebut. Evaluasi kesiapan teknologi dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan guna merumuskan kebijakan yang sesuai, yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Menurut Marston dan Watts (2003) dalam Nugroho (2020), bukti tersebut meliputi beragam sumber seperti pengetahuan ahli, penelitian, evaluasi kebijakan sebelumnya, hasil konsultasi, analisis ekonomi, dan data statistik. Evaluasi kesiapan teknologi pemerintah memungkinkan pencapaian keberhasilan dalam penerapan e-government karena berbagai faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi e-government sangat kompleks dan bervariasi. (Nugroho, 2020)

Untuk mengevaluasi kesiapan e-readiness, telah dikembangkan berbagai model, salah satunya adalah *Technology Organization-Environment (TOE)*, yang sering digunakan dalam penelitian implementasi teknologi. TOE menganalisis keputusan adopsi teknologi dengan mempertimbangkan faktor teknologi, organisasi, dan *environment*. Model TOE menyediakan kerangka analisis yang luas untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam penerapan ERP di pemerintahan. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari

faktor teknologi, organisasi, atau lingkungan. Model TOE juga menghindari pendekatan yang terlalu sederhana dengan hanya melihat teknologi sebagai faktor utama. Model ini mengakui bahwa keberhasilan penerapan ERP sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia, serta faktor lingkungan seperti kebijakan pemerintah, tekanan kompetitif, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, *Technology Organization-Environment* (TOE) cocok untuk penelitian yang secara khusus menganalisis kendala dalam penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) pada pemerintahan tepatnya di SKPD Kabupaten Indramayu.

Penerapan ERP pada organisasi dapat diibaratkan sebagai dua bilah mata pisau karena didalam penerapan ERP dapat dikatakan berhasil dan juga dikatakan tidak berhasil (Nugroho, 2020). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan ERP dalam pemerintahan agar, dimana penelitian ini berfokus pada pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian yang dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu memiliki tujuan untuk mengukur readiness atau kesiapan mereka dalam mengadopsi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang seberapa siap pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dalam mengadopsi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan memberikan saran untuk meningkatkan kesiapan tersebut. Penelitian ini akan mencakup langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesiapan baik dari segi organisasi maupun teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu serta bagi pembaca yang tertarik dengan topik ini.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapan implementasi ERP di SKPD Kabupaten Indramayu, baik secara individual maupun kolektif?
2. Bagaimana hasil analisis kesiapan implementasi ERP di SKPD Kabupaten Indramayu melalui penggunaan metode inovatif PLS-SEM untuk mengukur pengaruh teknologi, organisasi, dan lingkungan?
3. Apa saja rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan kepada SKPD Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi ERP berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh teknologi, organisasi, dan lingkungan?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesiapan implementasi ERP di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan variabel *technology*, *organization* dan *environment*.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan bagi SKPD di Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi ERP berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **I.4 Batasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada SKPD di Kabupaten Indramayu sebagai objek penelitian.
2. Penelitian ini hanya akan membahas kesiapan SKPD di Kabupaten Indramayu dalam implementasi ERP.
3. Penelitian ini hanya akan membahas kesiapan SKPD di Kabupaten Indramayu dalam implementasi sistem ERP ditinjau dari variabel *technology*, *organization* dan *environment*.

4. Penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey terhadap pegawai di SKPD Kabupaten Indramayu.
5. Penelitian ini hanya akan menggunakan metode *Partial Least Square Structural Equation Modelling* (PLS-SEM).
6. Penelitian ini tidak akan membahas implementasi ERP di luar lingkup SKPD Kabupaten Indramayu.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi organisasi pemerintah (SKPD) penelitian ini dapat memberikan gambaran serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi ERP.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat dalam menjadi model atau gambaran pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi ERP pada organisasi pemerintah daerah lainnya.

### **I.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan terdapat uraian mengenai konteks permasalahan, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II ini berisi literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas pula hasil-hasil penelitian terdahulu. Minimal terdapat lebih dari satu metodologi/metode/kerangka kerja yang disertakan pada bab ini untuk menyelesaikan permasalahan atau

meminimalisir gap antara kondisi eksisting dengan target. Pada akhir bab, analisis pemilihan metodologi/metode/kerangka kerja harus dijelaskan untuk menentukan metodologi/metode/kerangka kerja yang akan digunakan di penelitian ini.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan strategi dan langkah-langkah (*plan of attack*) yang akan dilakukan di penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yang disusun sebelumnya. Penyusunan metodologi penelitian harus dilakukan secara kritis apakah metode atau teknik yang dipilih memang tepat sesuai tujuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah penelitian secara rinci meliputi: tahap merumuskan masalah penelitian, merumuskan hipotesis, mengembangkan model penelitian, mengidentifikasi dan melakukan operasionalisasi variabel penelitian, menyusun kuesioner penelitian, merancang pengumpulan dan pengolahan data, melakukan uji instrumen, merancang analisis pengolahan data.

### **Bab V Hasil dan Evaluasi**

Pada bab ini, disajikan hasil rancangan, temuan, analisis dan pengolahan data. Selain itu bab ini juga berisi tentang validasi atau verifikasi hasil dari penelitian, sehingga hasil tersebut apakah telah benar-benar menyelesaikan masalah atau menurunkan gap antara kondisi eksisting dan target yang akan dicapai. Analisis sensitivitas juga dapat digunakan di bab ini untuk lebih mengetahui hasil penelitian dapat diterapkan baik secara khusus di konteks penelitian maupun secara umum di konteks serupa (misal perusahaan di sektor serupa). Selain itu metode-metode evaluasi yang lain dapat di terapkan untuk memvalidasi hasil TA sesuai dengan kebutuhan.

### **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang disajikan di

pendahuluan. Saran penelitian dikemukakan pada bab ini untuk penelitian selanjutnya.